



KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA

NOTULEN RAPAT

Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020

Topik: Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kementerian/ Lembaga dan Pemda di Kementerian Kesehatan, Pendidikan dan Sosial

1. Pelaksanaan

Hari/ Tanggal : Selasa, 21 Agustus 2018
Waktu : 14.00-16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat 204

2. Pimpinan Rapat : Kepala Subdirektorat Kualitas Pelayanan Publik,
Kementerian PPN/Bappenas

3. Peserta Rapat :

1. Asdep Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB
2. Biro Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Kementerian PAN RB
3. Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri
4. Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan
6. Bidang Pengaduan dan Informasi, Kementerian Sosial
7. Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri
8. Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri
9. YAPPIKA Action Aid
10. Sekretariat Open Government Indonesia

4. Pembahasan Rapat

1. Pertemuan bilateral hari ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Kick Off Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018.
2. Rencana aksi OGI berupaya untuk menajamkan RKP dan Renja K/L

3. Tujuan dari Renaksi ini adalah ingin mendorong terlaksananya Forum Konsultasi Publik di "xx" Kementerian/ Lembaga.
4. FKP menjadi hal yang penting karena memperkuat *evidence based policy making*, sehingga pembuatan kebijakan berdasarkan masalah riil di lapangan, dan akan berpotensi lebih berdampak karena sesuai kebutuhan akar rumput.
5. Urgensi lainnya, FKP merupakan amanat konstitusional dan regulasi, diatur melalui Permen PAN-RB No.16 tahun 2017 dan Surat Edaran No.56 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sedangkan adanya FKP mendorong terlaksananya UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.
6. Target jumlah Kementerian/ Lembaga yang akan menjadi target renaksi akan didiskusikan melalui mekanisme internal Kemenpan-RB.
7. Tujuan dari FKP memperoleh pemahaman hingga solusi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
8. Keuntungan diadakannya FKP:
 1. Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
 2. Bagi penyelenggara: memperoleh masukan, sarana mengajak dan mendidik, maupun monitoring.
 3. Bagi publik: masalah-masalah pelayanan publik dapat diatasi lebih cepat.
9. Prinsip pelaksanaan FKP: sederhana, partisipatif, transparansi, keadilan, akuntabel, dan berkelanjutan.
10. Bentuk FKP mencakup: tatap muka dan non tatap muka yang melibatkan aktor yang beragam/*multistakeholders*.
11. Forum ini menemukan temuan-temuan yang tidak sesuai di masyarakat, terutama pada kondisi masyarakat yang sulit mengakses kanal informasi dan pengaduan yang berbasis teknologi.
12. Dalam pelaksanaannya, terdiri dari 5 unsur pokok yaitu, tim bersikap netral, diskusi 2 arah, problem solving, solusi merupakan kesepakatan bersama, dan adanya pihak-pihak yang menandatangani berita acara.
13. Ada tindaklanjut pasca pelaksanaan untuk menilai Standar Kelayakan Minimum.
14. Kondisi saat ini terkait sosialisasi: sudah semuanya, daerah belum semua, sehingga perlu didorong lagi,

15. Target capaian: Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi melaksanakan FKP, namun masih minim pelaksanaan di daerah sehingga perlu peningkatan penerapan FKP di daerah.
16. Kemendikbud mengusulkan selama ini di Kemendikbud khususnya ada biro terkait layanan masyarakat (komunikasi-layanan masyarakat/ ULT/daring) mungkin bisa dioptimalkan untuk melakukan FKP di K/L.
17. Kemendagri menyampaikan pendapat bahwa realitas yang terjadi di masyarakat daerah justru cenderung sering kebingungan dengan program *top down* seperti FKP ini. Yang harus diperhatikan adalah bukan sekadar sosialisasi, tapi bagaimana K/L/D/I yang terlibat benar-benar siap dari segi pemahaman sehingga dapat mengajak keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan yang jelas. Untuk penerapan di daerah juga harus diperhatikan kesiapan aparatur desa.
18. Usulan yang diajukan adalah lingkup FKP dibatasi pada lingkup tertentu atau ada kategorisasi FKP berdasarkan sektor atau lingkup tertentu yang jelas.
19. Perlu dilakukan pertemuan bilateral lanjutan untuk membahas terkait finalisasi indikator capaian dan *milestone* kedepannya.
20. Selanjutnya hasil pertemuan tersebut akan dituangkan dalam template untuk Renaksi OGI 2018-2020.

Notulis Rapat
Syifa Amania Afra.

Ringkasan Hasil Pembahasan Usulan Aksi

Aksi : Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Kementerian/ Lembaga

Latar Belakang :

Sehubungan dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, FKP merupakan sebuah kebijakan yang mengakomodir kebutuhan tersebut. Namun, belum optimalnya implementasi PAN-RB No.16 tahun 2017 dan Surat Edaran No.56 Tahun 2017 pada tingkatan kementerian/ lembaga membutuhkan perhatian khusus.

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Kementerian/ Lembaga	Terlaksananya forum konsultasi publik di "xx" kementerian dan lembaga	1. Pelaksanaan sosialisasi kepada Pemda dan KDLI 2. Daftar KLDI yang sudah melaksanakan FKP. 3. Jumlah XX pilot project K/L/D	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Dalam Negeri